

ABSTRAK

Pokok gagasan dalam sistem pendaftaran adalah mencatat hak-hak atas tanah, kemudian mengembalikan bukti kepemilikan atas pemberian hak atas tanahnya. Prinsip pendaftaran tanah harus mencerminkan suatu ketelitian mengenai kepemilikan dari tanah dan hak-hak pihak ketiga yang mempengaruhinya. Prinsip jaminan pendaftaran tanah adalah status hak memberikan jaminan dari ketelitian suatu daftar. Pengakuan kepemilikan tanah dikonkretkan dengan adanya sertipikat tanah. Sertipikat hak hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Tahun 1993 Badan Pertanahan (BPN) Kota Cirebon menerbitkan 117 sertipikat hak milik atas tanah yang terletak di di Jalan Ampera Blok Gunungsari Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan luas sekitar 6,3 hektare. Penerbitan sertipikat didasarkan atas surat keterangan Kepala Kelurahan Pekiringan No. 04/PHAT/PKR/IX/93, No 05/PHAT/PKR/IX/93, No. 05/PHAT/PKR/IX/93, tanggal 17 September 1993. Tahun 2002 Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mempertanyakan mengenai keabsahan dari sertipikat-sertipikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Kota Cirebon pasalnya tanah yang saat ini dimiliki pribadi oleh warga merupakan tanah negara yang telah menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Socio Legal. Penelitian menggunakan kaedah hukum yaitu peraturan-peraturan tertulis yang terkait dengan Pendaftaran Tanah dan Kewenangan Pemerintah direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat tanah aset milik Pemerintah Provinsi.

Hasil penelitian mengenai pencekalan sertipikat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu dengan memberikan alternatif penyelesaian yang dapat menimbulkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, masyarakat pada khususnya. Model penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu model penyelesaian secara normatif, sosial dan progresif. Penyelesaian mengenai kasus pencekalan tanah milik warga Ampera ini seharusnya dapat segera dilakukan karena apabila semakin berlarut maka dapat lebih menimbulkan kerugian bagi pihak warga Ampera.

Kata Kunci: tanah aset pemerintah, pendaftaran tanah, pencekalan sertipikat

ABSTRACT

Principal ideas in the registration system is to record the rights to land, and then returns the proof of ownership of the land titling. The principle of land registration should reflect the accuracy of the ownership of the land and the rights of third parties that influence it. The principle is the status of land registration guarantees the right to a guarantee of the accuracy of a list. Recognition of land ownership concretized with the title deed. Land rights certificate serves as strong evidence as defined in Article 19 paragraph (2) c of the Basic Agrarian Law (BAL) and Article 32 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration.

In 1993 Land Agency (BPN) Cirebon 117 certificate issuing land titles located at Jalan Ampera Block Gunungsari Village Pekiringan Kesambi District of Cirebon, with an area of approximately 6.3 hectares. Issuance of certificates based on the certificate of the Village Head Pekiringan No. 04 / PHAT / PKR / IX / 93, No. 05 / PHAT / PKR / IX / 93, No. 05 / PHAT / PKR / IX / 93, dated September 17 in 1993. In 2002 the Government of West Java Province (West Java province) questioned the validity of the certificate-title deed issued by the city of Cirebon article BPN land that is currently privately owned by citizens of a country that has become a land of West Java Provincial Government assets.

The method used in this study using the method of approach Socio Legal. Research using legal norms are written regulations relating to the Land Registration Authority and the Government realized the study of matters relating to the issuance of certificates of land assets belonging to the Provincial Government.

Results of research on the blocking certificate by the Provincial Government of West Java is to provide an alternative solution can lead to justice for the parties involved, in particular community. Solution model that can be done is a model settlement normative, social and progressive. Completion of the case-owned land Ampera ban this should be done as if the more protracted, it can be cause harm to the citizens of the Ampera.

Keywords: government land assets, land registration, certificate ban